

**UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI:  
*FRAUD CONTROL PLAN* DAN *ETHICAL LEADERSHIP*  
(Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali)**

**SKRIPSI**

**TESSYA SEVIA AGUSTIN**  
**20200070028**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2024**

**UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI:  
*FRAUD CONTROL PLAN* DAN *ETHICAL LEADERSHIP*  
(Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Akuntansi*

**TESSYA SEVIA AGUSTIN**  
**20200070028**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2024**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENCEGAHAN  
KORUPSI: *FRAUD CONTROL PLAN* DAN *ETHICAL  
LEADERSHIP* (STUDI KASUS PADA PERWAKILAN  
BPKP PROVINSI BALI)

NAMA : TESSYA SEVIA AGUSTIN

NIM : 2020070028

"Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya dari saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut."

Sukabumi, 30 Juni 2024



TESSYA SEVIA AGUSTIN  
Penulis



## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENCEGAHAN  
KORUPSI: *FRAUD CONTROL PLAN* DAN *ETHICAL  
LEADERSHIP* (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi  
Bali)  
NAMA : TESSYA SEVIA AGUSTIN  
NIM : 2020007028

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang  
Skripsi tanggal 30 Juni 2024 Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari  
segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).


Sukabumi, 30 Juni 2024

Pembimbing I



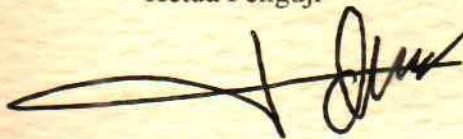
Nur Hidayah K Fadhillah, M.Ak  
NIDN: 0428069601

Pembimbing II



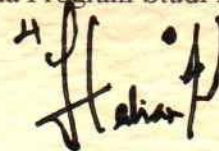
Nanan Sunandar, M.Akt  
NIDN: 0410128303

Ketua Penguji



Muhammad Zulvan Dwi Hatmoko, M.Acc  
NIDN: 0412079302

Ketua Program Studi Akuntansi



Heliani, M.Ak  
NIDN: 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, SH., M.H  
NIDN: 0414058705

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian dengan judul "Upaya Preventif Terhadap Pencegahan Korupsi: *Fraud Control Plan* dan *Ethical Leadership* (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali)".

Terimakasih penulis ucapkan kepada para pembimbing, Ibu Nur Hidayah K Fadhillah S.E., M.Ak dan Bapak Nanan Sunandar S.E., M.Akt yang telah membimbing dan banyak memberi saran. Terutama ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ibu, ayah, dan adik saya serta keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.



## ABSTRAK

*Fraud control plan* dan *ethical leadership* sangat penting untuk diimplementasikan oleh seluruh organisasi. Mengimplementasikan sepuluh atribut *fraud control plan* secara penuh dan memperoleh dukungan dari pemimpin dapat mencapai tujuan organisasi dalam membangun budaya anti korupsi dan mencegah serta mengendalikan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *fraud control plan* dan *ethical leadership* sebagai upaya preventif dalam pencegahan korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, wawancara, dan internet *searching*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mengimplementasikan *fraud control plan* secara menyeluruh dan memperoleh dukungan dari pemimpin. Namun, ditemukan hingga saat ini Perwakilan BPKP Provinsi Bali belum melaksanakan evaluasi berupa penerbitan laporan pemantauan gratifikasi dan benturan kepentingan, karena keterbatasan waktu. Banyaknya penugasan mendesak yang harus ditangani telah mengurangi waktu yang tersedia untuk melaksanakan pelaporan.

**Kata kunci:** *Fraud Control Plan, Ethical Leadership, Korupsi*

## **ABSTRACT**

*Fraud control plan and ethical leadership are very important to be implemented by the entire organization. Fully implementing the ten attributes of the fraud control plan and obtaining support from leaders can achieve the organization's goals in building an anti-corruption culture and preventing and controlling corruption. This study aims to find out fraud control plan and ethical leadership as a preventive effort in preventing corruption.*

*This research is a qualitative research with a descriptive approach, the data used are primary data and secondary data. Data collection techniques use observations, questionnaires, interviews, and internet searching. The results of the study show that the Perwakilan BPKP Provinsi Bali has implemented a comprehensive fraud control plan and received support from leaders. However, it was found that until now the Perwakilan BPKP Provinsi Bali has not carried out an evaluation in the form of issuing a gratuity and conflict of interest monitoring report, due to time constraints. The large number of urgent assignments that must be addressed has reduced the time available to carry out reporting in the form of gratuity monitoring and conflicts of interest.*

**Keywords:** *Fraud Control Plan, Ethical Leadership, Corruption*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karuni-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah "Upaya Preventif Terhadap Pencegahan Korupsi: *Fraud Control Plan* dan *Ethical Leadership* (Studi Kasus pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali)". Tujuan penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan di Universitas Nusa Putra.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis alami. Namun, berkat doa, usaha, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., MM
2. Bapak Wakil Rektor Universitas Nusa Putra Anggy Pradiftha Junfithrana, M.T
3. Ibu Heliani, S.E., M.Ak sebagai Ketua Program Studi Akuntansi
4. Ibu Nur Hidayah K Fadhilah, S.E., M.Ak sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan, arahan, motivasi, semangat, dan kepercayaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Nanan Sunandar, S.E., M.Ak sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Zulvan Dwihatmoko, M.Acc sebagai dosen ketua penguji sidang skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Taofik Muhammad Gumelar, S.E., M.Ak., CA, Ak sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan terhadap skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah.



9. Teristimewa kedua orangtua tercinta Bapak Agus Kusmiadi dan Ibu Epa Sepiana yang selalu berjuang tanpa henti memberikan dukungan dan doa.
10. Adik Armitha Agustin dan Arya Syahdan Agustin yang turut mendukung dalam hal apapun.
11. Bapak Ahmad Faiz selaku Subkoor Kepegawaian Perwakilan Provinsi Bali
12. Ibu CD selaku Auditor Penyelia di Perwakilan BPKP Provinsi Bali
13. Ibu MDA selaku Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Bali
14. Bapak MS selaku Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Bali
15. Ibu DN, Bapak DK, Ibu AC, dan Ibu AA selaku Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Bali
16. Sahabat seperjuangan Risa Septiyanti yang senantiasa mendengarkan dan memberikan saran terhadap keluh kesah peneliti, memberi dukungan, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Semua pihak yang telah berperan dalam kegiatan ini yang memang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih banyak dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Sukabumi, 30 Juni 2024

Tessya Sevia Agustin

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tessya Sevia Agustin  
NIM : 20200070028  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Upaya Preventif Terhadap Pencegahan Korupsi: *Fraud Control Plan* dan *Ethical Leadership* (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi  
Pada tanggal : 30 Juni 2024

Yang menyatakan



(Tessya Sevia Agustin)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
17.1 .....	Latar
Belakang .....	1
17.2.....	Rumusan
Masalah.....	9
17.3.....	Tujuan
Penelitian .....	10
17.4.....	Manfaat
Penelitian .....	11
17.4.1.....	Manfaat
Teoritis .....	11
17.4.2.....	Manfaat
Praktis .....	11
17.5.....	Batasan
Penelitian .....	11
17.6.....	Sistematikan
Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 Kajian Pustaka .....	12

2.1.1 Fraud Triangle Theory .....	12
2.1.2 Iceberg Phenomenon.....	13
2.1.3 Fraud Control Plan.....	14
2.1.4 Tahapan Fraud Control Plan .....	16
2.1.5 Ethical Leadership.....	17
2.1.6 Korupsi.....	18
2.2 Kerangka Berpikir.....	18
2.3 Kajian Peneliti Terdahulu .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	25
3.1.1 Jenis Penelitian.....	25
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.2 Informan Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3.1 Jenis Data .....	26
3.3.2 Sumber Data.....	26
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5 Instrumen Penelitian .....	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
3.7 Uji Keabsahan Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Lembaga.....	31
4.1.1 Sejarah Lembaga.....	31
4.1.2 Lokasi Lembaga.....	31
4.1.3 Visi dan Misi Lembaga.....	32
4.1.4 Struktur Organisasi .....	32
4.2 Hasil Penelitian .....	35
4.2.1 Fraud Control Plan.....	35
4.2.2 Fraud Control Plan Terhadap Pencegahan Korupsi .....	39
4.2.3 Ethical Leadership.....	40
4.2.4 Ethical Leadership Terhadap Pencegahan Korupsi .....	42
4.2.5 Fraud Control Plan dan Ethical Leadership terhadap Pencegahan Korupsi .....	44



4.3 Pembahasan Penelitian .....	46
4.3.1 Implementasi Fraud Control Plan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam Kontribusinya Terhadap Pencegahan Korupsi .....	46
4.3.2 Dampak dari Ethical Leadership di Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam Upaya Pencegahan Korupsi .....	52
4.3.3 Fraud Control Plan dan Ethical Leadership dalam Mengurangi Korupsi di Wilayah Bali .....	53
BAB V PENUTUP .....	55
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skor dan Peringkat Korupsi Indonesia Tahun 2019-2023 .....	1
Tabel 1.2 Total Kasus Fraud di Kawasan Asia Tahun 2022 .....	2
Tabel 1.3 Skema Fraud Paling Umum Terjadi di Kawasan Asia Tahun 2023.....	3
Tabel 1.4 Tiga Besar Perolehan Skor MCP Provinsi di Indonesia Tahun 2023 .....	7
Tabel 1.5 Perbedaan BPK dan BPKP.....	7
Tabel 1.6 Persamaan dan Perbedaan APIP Indonesia .....	8
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.2 Daftar Informan.....	26



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Skor CPI Indonesia dan Korea Selatan 2019-2023 .....	2
Gambar 1.2 Potensi Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi Tahun 2019-2023 .....	3
Gambar 2.1.1 Fraud Triangle Theory .....	12
Gambar 2.1.3 Iceberg Phenomenon .....	13
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir .....	19
Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bali .....	33
Gambar 4.2.3 Kegiatan Apel Pagi .....	45



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah fenomena *fraud* yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Transparency International* global, yaitu *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 34; skor ini stagnan dari tahun sebelumnya, namun mempengaruhi peringkat. Pada tahun 2022, skor korupsi Indonesia sebesar 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Sementara tahun 2023, skor korupsi Indonesia sebesar 34 dengan peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini bahkan masih rendah dibanding median CPI global, yaitu 43. Sebagai informasi, skala CPI adalah 0 sampai 100. Skala 0 artinya negara tersebut sangat korupsi dan skala 100 artinya negara tersebut bersih korupsi (CPI, 2023). Perolehan skor 34 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi rentan korupsi. Penegak hukum anti korupsi di Indonesia terbukti belum efektif memberantas korupsi (ICW, 2023).

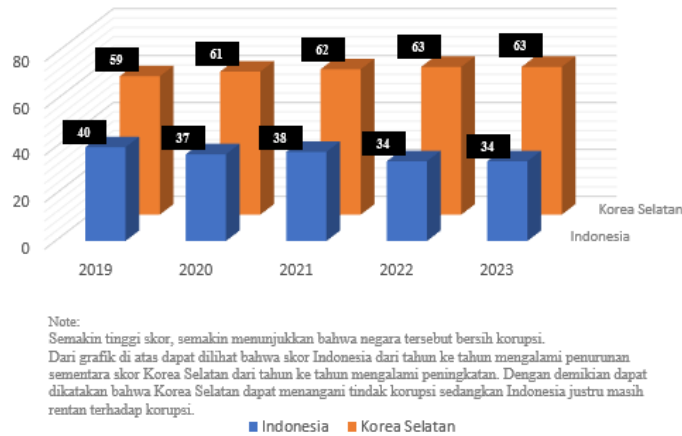
**Tabel 1.1 Skor dan Peringkat Korupsi Indonesia Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Skor	Peringkat
1	2019	40	85/180 negara
2	2020	37	102/180 negara
3	2021	38	96/180
4	2022	34	110/180
5	2023	34	115/180

Sumber: [www.transparency.org](http://www.transparency.org)



**SKOR KORUPSI  
INDONESIA DAN KOREA SELATAN  
TAHUN 2019-2023**



**Gambar 1.1 Perbandingan Skor CPI Indonesia dan Korea Selatan 2019-2023**  
(Sumber: [www.transparency.org](http://www.transparency.org))

Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners* tentang *Occupational Fraud 2022: a Report to The Nations*, Indonesia menempati peringkat empat di Asia dalam jumlah kasus *fraud* tahun 2022, dengan total 23 kasus, setelah Australia, China, dan Malaysia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas *fraud*, Indonesia tetap rentan terhadap risiko kecurangan.

**Tabel 1.2 Total Kasus Fraud di Kawasan Asia Tahun 2022**

No	Negara	Total Kasus	No	Negara	Total Kasus
1	Australia	38	10	New Zealand	6
2	China	33	11	Taiwan	3
3	Malaysia	25	12	Papua New Guinea	3
4	<b>Indonesia</b>	<b>23</b>	13	Korea Selatan	2
5	Singapura	13	14	American Samoa	2
6	Hongkong	13	15	Fiji	1
7	Filipina	12	16	Laos	1
8	Thailand	9	17	Micronesia	1
9	Vietnam	8	18	Solomon Island	1

Sumber: ACFE 2022, Data diolah 2024

Korupsi mencakup praktik seperti suap, gratifikasi, pungutan liar, penyalahgunaan keuangan, penggelapan, atau pencucian uang. Menurut Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak

lain dengan cara menyalahgunakan jabatan, kewenangan, sarana, atau kesempatan yang merugikan perekonomian dan keuangan negara. Menurut laporan ICW tahun 2023, terdapat 791 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun. Meskipun ada penurunan, kerugian tersebut masih tinggi, menunjukkan kegagalan dalam manajemen keuangan negara dan kurangnya pengawasan (ICW, 2023).



**Gambar 1.2 Potensi Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi Tahun 2019-2023**  
(Sumber: ICW 2023)

*Fraud*, termasuk korupsi, diatur dalam taksonomi ACFE *Fraud Tree* yang mencakup penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, dan bentuk lainnya seperti benturan kepentingan, penyuapan, pemberian hadiah tidak sah, serta pemerasan ekonomi. Korupsi, sebagai skema fraud umum di Asia termasuk Indonesia, mencatatkan 57% dari kasus-kasus yang terjadi (ACFE, 2022).

**Tabel 1.3 Skema *Fraud* Paling Umum Terjadi di Kawasan Asia Tahun 2022**

No	Skema <i>Fraud</i>	Persentase
1	<b>Korupsi</b>	<b>57%</b>
2	Penagihan	20%
3	Non-tunai	17%
4	Penggantian Biaya	15%
5	Uang Tunai	11%
6	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	11%
7	Penggajian	11%
8	Gangguan Cek dan Pembayaran	9%
9	Skimming	9%
10	Pencurian Uang Tunai	6%
11	Mendaftarkan Pencairan Dana	2%

Sumber: ACFE 2022, Data diolah 2024

Terjadinya perbuatan korupsi tidak memandang dari mana asal organisasi tersebut. Termasuk pemerintahan. Dilansir dari ACFE (2022), jenis organisasi paling dirugikan oleh *fraud* adalah organisasi pemerintahan dengan total kerugian mencapai \$138,000. Berikut adalah bukti nyata yang menunjukkan bahwa ranah pemerintahan pun rentan terjadi praktik korupsi.

Kasus korupsi di pemerintahan wilayah Bali, yakni skandal korupsi Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kalianget. Kasus ini terungkap pada tahun 2020, dimana ketua LPD melakukan pinjaman secara berkala tanpa disertai pengembalian dana yang diperoleh hingga nominalnya membengkak. Menurut hasil audit BPKP Provinsi Bali, negara mengalami kerugian hingga Rp 355 juta akibat kasus ini (Nusa Bali, 2020). Kasus kredit fiktif Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali tahun 2022 menunjukkan bahwaajuan kredit sebesar Rp 5 miliar melalui CV, SU, dan DBD untuk pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta Bali ternyata fiktif. Kepala BPD Bali Cabang Badung menyetujui dan mencairkan kredit ke rekening giro ketiga entitas tanpa sesuai dengan surat perintah kerja (SPK), mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 4,4 miliar menurut BPKP Bali (DetikBali, 2023).

Berdasarkan kasus korupsi di atas, banyak praktisi dan akademisi menjelaskan faktor-faktor individu yang mungkin berbuat korupsi melalui teori *fraud triangle* (Cressey, 1953). Teori ini menyatakan bahwa individu melakukan *fraud* karena tekanan (*pressure*) seperti masalah finansial, ada kesempatan (*opportunity*), dan membenarkan perbuatan tersebut (rasionalisasi) (Cressey, 1953; Wiley, 2017). Jika individu ingin berbuat *fraud*, maka ketiga elemen dalam teori *fraud triangle* ini harus dimiliki (Ratmono et al., 2018; Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017).

Terjadinya praktik korupsi di ranah pemerintah mendorong pihak didalamnya untuk dapat segera menangani segala bentuk risiko yang merugikan. Kasus di atas menunjukkan bahwa korupsi terjadi karena lemahnya pengendalian internal (Amrizal, 2015). Semakin berkembang organisasi, semakin kompleks tanggung jawab manajemen (Amrizal, 2015). Untuk mencapai tujuan organisasi, melindungi aset, dan memastikan operasi yang efektif, diperlukan sistem pengendalian internal

yang kuat untuk mencegah *fraud*. Penanganan korupsi tidak mudah karena bersifat sistematis dan melibatkan banyak unsur, sehingga membutuhkan upaya preventif yang sistematis.

Menurut Artikel 5 UNCAC Tahun 2003, pencegahan korupsi harus mencakup upaya preventif, bukan hanya represif (BPKP, 2007). Upaya preventif harus diprioritaskan karena korupsi menyebabkan kerugian finansial besar, merusak reputasi, hasil pemulihan uang kecil, dan memberi waktu bagi pelaku untuk menutupi tindakan mereka. Proses litigasi juga memakan waktu dan biaya yang signifikan (BPKP, 2007). Oleh karena itu, tindakan yang tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan mengutamakan upaya preventif.

Tindakan preventif yang dimaksud adalah implementasi *fraud control plan*. Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2014, presiden memerintahkan BPKP untuk meningkatkan pendapatan negara/daerah dan efisiensi anggaran melalui pemantauan, evaluasi sistem pengendalian internal, dan pengendalian kecurangan. Deputi Bidang Investigasi BPKP berperan dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi *fraud* dengan mengadopsi *fraud control plan*. Tujuan *fraud control plan* adalah memperkuat pengendalian internal yang ada untuk melindungi organisasi dari risiko *fraud*.

Menurut BPKP, *fraud control plan* memiliki sepuluh atribut: kebijakan anti-*fraud*, struktur anti-*fraud*, standar perilaku dan disiplin, penilaian risiko *fraud* (FRA), manajemen sumber daya manusia, manajemen pihak ketiga, sistem *whistleblowing* dan perlindungan pelapor, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif. Atribut-atribut ini memperkuat tata kelola organisasi dan saling berkorelasi. Kekurangan salah satu atribut dapat menghambat efektivitas Fraud Control Plan dan memerlukan pemantauan berkelanjutan (Iskandar & Yuniasih, 2019). Implementasi lengkap dari sepuluh atribut ini menciptakan lingkungan anti-*fraud* yang efektif dan meningkatkan kesadaran serta pencegahan korupsi dalam organisasi.



Sistem *whistleblowing* adalah bagian penting dari *fraud control plan* untuk melaporkan tindakan melanggar hukum (KNKG, 2008). Ketersediaannya menunjukkan kepedulian terhadap pencegahan *fraud*. Sistem ini memungkinkan pelaporan pelanggaran hukum oleh individu, menciptakan lingkungan yang mengurangi *fraud* atau korupsi (Kuncara, 2022). Meskipun implementasinya berbeda-beda, tujuannya sama: mencegah korupsi dan memberikan pengawasan. Pelapor juga dilindungi dengan kerahasiaan identitas, perlindungan dari tindakan balasan, dan informasi tindak lanjut (KNKG, 2008; Kurnia, 2023).

Kepemimpinan (*leadership*) sangat penting dalam mencegah korupsi dan implementasi *fraud control plan*. Tanpa kepemimpinan yang baik, *fraud control plan* tidak akan berjalan. Kasus-kasus korupsi menunjukkan bagaimana pimpinan yang tidak bertanggung jawab bisa merugikan organisasi dan negara. *Ethical leadership* ditunjukkan melalui perilaku pribadi, interaksi interpersonal, dan penyebaran nilai-nilai etis (Brown et al., 2005). Pimpinan yang peduli pada anggota dan pemangku kepentingan adalah contoh *ethical leadership* (Anggraini & Siswanto, 2019). Dengan kepemimpinan yang baik, *fraud control plan* dapat diimplementasikan secara efektif, menciptakan lingkungan anti-korupsi dan meningkatkan kesadaran anggota terhadap tindakan korupsi.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali dipilih sebagai objek penelitian ini karena Kota Denpasar telah diakui sebagai Calon Percontohan Kota Anti Korupsi oleh KPK RI (Pemerintah Kota Denpasar, 2024). KPK RI mencatat bahwa Denpasar telah memenuhi tiga pilar utama: penindakan melalui operasi tangkap tangan untuk menciptakan efek jera, pencegahan dengan memperbaiki sistem untuk mencegah korupsi, dan pendidikan untuk membangun budaya anti korupsi dengan partisipasi masyarakat..

Pemilihan Kota Denpasar sebagai contoh kota anti korupsi didukung oleh nilai MCP tahun 2023 yang mencapai 97,29. Kota ini meraih peringkat keenam nasional dan tertinggi di Provinsi Bali, yang juga membantu Provinsi Bali meraih skor MCP 96, mengungguli Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta di peringkat tiga.

MCP adalah aplikasi dari KPK untuk memantau program pencegahan korupsi yang fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan.

**Tabel 1.4 Tiga Besar Perolehan Skor MCP Provinsi di Indonesia Tahun 2023**

No	Provinsi	Skor
1	Provinsi Bali	96
2	Provinsi Jawa Barat	95,94
3	Provinsi DKI Jakarta	95,75

Sumber: [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id)

Untuk mencapai skor tinggi dalam MCP, metode pendorong yang penting adalah peran *fraud control plan*. Keberhasilan Provinsi Bali sebagai yang terbaik dalam pencegahan korupsi menunjukkan efektivitas implementasi *fraud control plan* di wilayah tersebut. Pemilihan Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai objek penelitian tepat untuk memahami bagaimana pimpinan yang baik dan implementasi *fraud control plan* berkontribusi dalam pencegahan korupsi.

BPKP adalah lembaga pengawas intern pemerintah yang bertugas membangun kerja sama dalam pengawasan intern untuk akuntabilitas keuangan negara/daerah dan kemajuan nasional. Berbeda dengan BPK, BPKP merupakan lembaga non-kementerian yang berada di bawah Presiden, setara dengan lembaga pemerintah non-kementerian lainnya seperti Bapennas, BPN, BNN, BKPM, BKN, dan BNPB. Di sisi lain, BPK atau badan pemeriksa keuangan adalah lembaga negara RI yang setara dengan MPR-RI, DPD-RI, DPR-RI, Presiden, Wakil Presiden, MA-RI, dan MK-RI.

**Tabel 1.5 Perbedaan BPK dan BPKP**

No	Uraian	BPK	BPKP
1	Dasar Hukum	UU No. 15 Tahun 2006	PP No. 60 Tahun 2008
2	Hubungan Kelembagaan	DPR, DPD, DPRD	Ditunjuk & bertanggung jawab kepada presiden
3	Jenis Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit keuangan</li> <li>• Audit kinerja</li> <li>• Audit dengan tujuan tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit kinerja</li> <li>• Audit dengan tujuan tertentu</li> </ul>
4	Objek	Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (termasuk keuangan daerah) – <b>APBN dan APBD</b>	Mengawasi kegiatan <b>Kebendaharaan Umum Negara yang bersumber dari APBN</b> dan penugasan khusus dari Presiden
5	Sifat	Eksternal Pemerintah	Internal Pemerintah

6	Wewenang dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan dan meminta dokumen terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</li> <li>• Menetapkan standar pemeriksaan keuangan.</li> <li>• Membina jabatan fungsional Pemeriksa.</li> <li>• Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan dan rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.</li> <li>• Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara.</li> <li>• Memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah</li> <li>• Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.</li> <li>• Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah.</li> <li>• Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.</li> </ul>
---	---------------------	--	--

Sumber: [kepri.bpk.go.id](http://kepri.bpk.go.id)

APIP di Indonesia terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota. Meskipun memiliki tugas serupa dalam pengawasan intern pemerintahan, keempat APIP ini memiliki objek yang berbeda.

**Tabel 1.6 Persamaan dan Perbedaan APIP Indonesia**

No.	Uraian	BPKP	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Provinsi	Inspektorat Kabupaten/Kota
1	Dasar Hukum	PP No. 60 Tahun 2008	PP No. 60 Tahun 2008	PP No. 60 Tahun 2008	PP No. 60 Tahun 2008
2	Hubungan Kelembagaan	Ditunjuk & bertanggung jawab kepada Presiden	Ditunjuk & bertanggung jawab kepada Menteri	Ditunjuk & bertanggung jawab kepada Gubernur	Ditunjuk & bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota
3	Jenis Audit	Audit kinerja & audit dengan tujuan tertentu	Audit kinerja & audit dengan tujuan tertentu	Audit kinerja & audit dengan tujuan tertentu	Audit kinerja & audit dengan tujuan tertentu
4	Objek	Mengawasi kegiatan	Mengawasi kegiatan	Mengawasi kegiatan	Mengawasi kegiatan

		<b>Kebendaharaan Umum Negara yang bersumber dari APBN dan penugasan khusus dari Presiden</b>	<b>kementerian tertentu yang bersumber dari APBN di Kementerian tersebut.</b>	<b>pemerintah provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi.</b>	<b>pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota</b>
5	Sifat	Internal pemerintah	Internal pemerintah	Internal pemerintah	Internal pemerintah
6	Wewenang dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.</li> <li>• Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah.</li> <li>• Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisien, dan efektivitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.</li> <li>• Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola instansi Pemerintah.</li> <li>• Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.</li> <li>• Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah.</li> <li>• Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.</li> <li>• Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah.</li> <li>• Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.</li> </ul>

Sumber: *kepri.bpk.go.id*

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **”Upaya Preventif Terhadap Pencegahan Korupsi: *Fraud Control Plan* dan *Ethical Leadership* (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi latar belakang di atas, maka timbul rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana implementasi *Fraud Control Plan* di Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam kontribusinya terhadap pencegahan korupsi?



- 2) Apakah *Ethical leadership* di Perwakilan BPKP Provinsi Bali memiliki dampak dalam upaya pencegahan korupsi?
- 3) Bagaimana *Fraud Control Plan* dan *Ethical Leadership* mampu mengurangi tindakan korupsi di wilayah Bali?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

- 1) Mengetahui implementasi *Fraud Control Plan* di Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam kontribusinya terhadap pencegahan korupsi.
- 2) Mengetahui dampak dari *Ethical Leadership* di Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya pencegahan korupsi.
- 3) Mengetahui *Fraud Control Plan* dan *Ethical Leadership* dalam mengurangi korupsi di wilayah Bali.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang melakukan penelitian dan menjadi sumber pembelajaran tentang pencegahan korupsi melalui pendekatan preventif seperti *fraud control plan* dan *ethical leadership*.



#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan nilai tambah bagi para peneliti dan menjadi sumber pengetahuan tentang strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan preventif, yakni *fraud control plan* dan *ethical leadership*.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan *fraud control plan* dan *ethical leadership*. Selain itu, diharapkan juga menjadi referensi bagi penulis berikutnya yang akan melaksanakan penelitian.

##### b. Bagi Organisasi/Lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat membantu unit Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan auditornya dalam menjaga kualitas dan membantu organisasi untuk mengimplementasikan *fraud control plan* dan *ethical leadership*.

### 1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di latar belakang, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. *Fraud control plan* dan *ethical leadership* yang diimplementasikan Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
2. Objek dalam penelitian adalah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
3. Informan penelitian adalah auditor di bidang investigasi.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bagian ini memuat latar belakang penelitian, rumusan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
	Bagian ini memuat kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.
BAB III	METODE PENELITIAN
	Bagian ini memuat metode penelitian: rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik validitas data, tahapan penelitian, dan hambatan penelitian.
BAB IV	HASIL PENELITIAN
	Bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasannya yang diorganisasikan sesuai topik dalam cakupan fokus dan/atau rumusan masalah.
BAB V	PENUTUP
	Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai upaya preventif terhadap pencegahan korupsi melalui FCP dan *ethical leadership* di Perwakilan BPKP Provinsi Bali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan korupsi sebelum adanya FCP:
  - a. Sebelum diterbitkannya Peraturan Deputy Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2021, belum ada pedoman khusus untuk rencana pengendalian kecurangan (*Fraud Control Plan*).
  - b. Regulasi yang ada tidak secara spesifik mengatur prosedur penanganan korupsi oleh pegawai, yang menyebabkan kesulitan dalam pelaporan dan tindak lanjut.
2. Sistem Pelaporan Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Bali meliputi sistem *whistleblowing*, pelaporan gratifikasi, dan pelaporan benturan kepentingan.
3. Bapak MM selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali terlibat langsung dalam implementasi dan pengawasan FCP. Beliau selalu memastikan bahwa setiap laporan korupsi dan/atau kecurangan yang dilaporkan ditangani dengan serius sesuai prosedur. Selain itu, beliau selalu mengadakan rapat secara berkala untuk meninjau laporan-laporan korupsi maupun kecurangan yang masuk dan membahas tindak lanjut yang diperlukan.
4. Kekurangan dalam implementasi FCP yaitu kurangnya pemahaman pedoman FCP, kekhawatiran kerahasiaan pelapor, dan tantangan dalam pelaksanaan evaluasi FCP.
5. Kepemimpinan etis Bapak MM memberikan dampak positif dalam pencegahan korupsi melalui pelaksanaan dan evaluasi FCP yang efektif.
6. Implementasi FCP dan kepemimpinan etis di Perwakilan BPKP Provinsi Bali berkontribusi signifikan dalam menjadikan Provinsi Bali sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi. Kolaborasi dan komitmennya terhadap

transparansi serta akuntabilitas menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan belum sempurna. Namun, peneliti mencoba memberikan saran bagi lembaga sebagai objek penelitian dan juga bagi peneliti selanjutnya, agar untuk masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik.

### 1. Bagi Lembaga (Perwakilan BPKP Provinsi Bali)

Diharapkan agar Perwakilan BPKP Provinsi Bali meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pelatihan terkait FCP bagi seluruh pegawai, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang pedoman dan prosedur FCP yang perlu diikuti. Selain itu, penting untuk segera melakukan evaluasi dengan menyusun laporan pemantauan gratifikasi dan benturan kepentingan guna mengidentifikasi serta mengatasi kelemahan yang ada, dan untuk memperbaiki sistem pengendalian korupsi

### 2. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas FCP di berbagai instansi pemerintah selain BPKP, untuk memperoleh gambaran lebih luas tentang penerapan dan dampaknya. Selain itu, fokus pada atribut-atribut FCP secara spesifik seperti kebijakan anti kecurangan, struktur anti kecurangan, standar perilaku dan disiplin, FRA, manajemen SDM, manajemen pihak ketiga, sistem *whistleblowing* dan perlindungan pelapor, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. In *Association of Certified Fraud Examiners*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>
- Al-sharafi, H., & Rajiani, I. (2013). Promoting Organizational Citizenship Behavior among employees - The Role of Leadership practices. *International Journal of Business and Management*, 8(6). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n6p47>
- Amrizal, A. (2015). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan. *Bpkp RI*, 5(Internal Audit), 1–17.
- Andintya, R. A. (2023). *Pengaruh Ethical Leadership dan Bystander Effect Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Niat Whistleblowing* [Universitas Kristen Satya Wacana].  
[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29856/5/T1\\_232019179\\_Judul.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29856/5/T1_232019179_Judul.pdf)
- Anggraini, F. R. R., & Siswanto, F. A. J. (2019). Ethical Leadership For Internal Auditor: an Examination of Social Cognitive Theory. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 165–179. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.09>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Barunawati, D. (2019). Analisis Atribut-Atribut Fraud Control Plan (FCP) dan Penilaian Tingkat Risiko Fraud di PT. XYZ Kabupaten Gresik. *Repository STIE Mahardhika Surabaya*.  
<http://repository.stiemahardhika.ac.id/1768/3/17350331> - JURNAL DESY BARUNAWATI.pdf
- BPKP. (2007). Fraud Control Plan. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi*.
- Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002>
- Buble, M. (2012). Interdependence of Organizational Culture and Leadership Styles in Large Firms. *Management (Croatia)*, 17(2), 85–97.
- Burke, D. D., & Sanney, K. J. (2018). Applying the Fraud Triangle to Higher Education: Ethical Implications. *Journal of Legal Studies Education*, 35(1), 5–43. <https://doi.org/10.1111/jlse.12068>
- CPI. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022*. [www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)
- Cressey, D. . (1953). Other People's Money: A Study in The Social Psychology of Embezzlement. *Free Press.*
- DetikBali. (2023). *Kasus Kredit Fiktif BPD Bali, Kejari Badung Sita Tanah 2.180*



- Meter Persegi*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7023327/kasus-kredit-fiktif-bpd-bali-kejari-badung-sita-tanah-2-180-meter-persegi>
- Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). Sisi Gelap Pemimpin dalam Memotivasi Tindakan Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1362>
- ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. In *Www.Antikorupsi.Org*. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf)
- Irwandi, S. A., & Pamungkas, I. D. (2022). *Buku Ajar Audit Investigatif*. PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- Iskandar, M. A., & Yuniasih, R. (2019). Development of a Fraud Risk Control Policy Framework for Public Sector Organizations. *Proceedings of the Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018)*, 89(Apbec 2018), 303–312. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.40>
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing System - WBS)*. [https://drive.google.com/file/d/113rMVNS7qiABHk8deqw8ryVJ20f\\_wO3I/view](https://drive.google.com/file/d/113rMVNS7qiABHk8deqw8ryVJ20f_wO3I/view)
- Kuncara, W. A. (2022). The Influence of Whistleblowing System and Internal Control on Fraud Prevention at PT Pos Indonesia (Persero) Bandung City. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(2), 101–113. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v4i2.250>
- Kurnia, A. D. (2023). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kompetensi, Budaya Organisasi dan Whistleblowing System Terhadap Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pemerintah Desa Se-Kabupaten Kebumen). In *Repositori Mahasiswa Untidar* (Vol. 4, Issue 1). <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=38770&bid=14355>
- Mais, R. G., & Indah, A. K. (2023). Peran Bidang Investigasi Bpkp DKI Jakarta Dalam Pencegahan Fraud Dengan Menggunakan Fraud Control Plan. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(2), 384–401. <https://current.ejournal.unri.ac.id/index.php/jc/article/view/432>
- Miles, Mathew, B., & Huberman, M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Nusa Bali. (2020). *Korupsi Rp 355 Juta, Ketua LPD Kalianget Jadi Tersangka*. NusaBali.Com. <https://www.nusabali.com/berita/87282/korupsi-rp-355-juta-ketua-lpd-kalianget-jadi-tersangka>

- Pemerintah Kota Denpasar. (2024). *Denpasar Jadi Calon Percontohan Kota Anti-Korupsi Tahun 2024*. Pemerintah Kota Denpasar. <https://www.denpasarkota.go.id/berita/denpasar-jadi-calon-percontohan-kota-antikorupsi-kpk-ri>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2022). *Pemerintah Provinsi Bali Memperoleh Penghargaan Sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik Dalam SPI dari KPK RI*. Pemerintah Provinsi Bali. <https://www.baliprov.go.id/web/pemerintah-provinsi-bali-memperoleh-penghargaan-sebagai-pemerintah-provinsi-terbaik-dalam-spi-dari-kpk-ri/>
- Ratmono, D., Diany, Y. A., & Purwanto, A. (2018). Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan? *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 14(2), 100. <https://doi.org/10.14710/jaa.14.2.100-117>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Syafira, H., & Chairi, A. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal , Whistleblowing , Dan Ethical Leadership Terhadap Pencegahan Fraud ( Studi Empiris Pada Kantor Perwakilan Bpkp Jawa Tengah ). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–13.
- Tagora, A. (2022). Mekanisme dan Implementasi Fraud Control Plan: Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 133–144. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.424>
- Treviño, L. K., Brown, M., & Hartman, L. P. (2003). A Qualitative Investigation of Perceived Executive Ethical Leadership: Perceptions from Inside and Outside the Executive Suite. *Human Relations*, 56(1), 5–37. <https://doi.org/10.1177/0018726703056001448>
- Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 47. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.133>
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 233–247. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.49346>
- Wicaksono, D., & Yuhertiana, I. (2020). Case Study: Evaluation of Fraud Control Plan (FCP) Attributes as Fraud Prevention Tool. *E-Prosiding Akuntansi*, 7. <http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/779>
- Wiley, J. (2017). *Corporate Fraud Handbook Prevention and Detection*. In *John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey* (Fifth Edit). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119351962>
- Winarto, J., & Widyaishwara. (2016). Menangkal Korupsi dengan Memahami Fraud Triangle. *Badan Diklat Pemprov. Jawa Timur*, 2016.

[http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1482119180\\_Memahami FRAUD TRIANGLE.pdf](http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1482119180_Memahami_FRAUD_TRIANGLE.pdf)

- Xie, L., Xu, T., & Ju, T. (2023). Explaining the alienation of megaproject environmental responsibility behavior: a fuzzy set qualitative comparative analysis study in China. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 30(7), 2794–2813. <https://doi.org/10.1108/ECAM-10-2021-0919>
- Yudanto, C. D. H. (2019). Peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Terhadap Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).





## CURRICULUM VITAE

Nama : Tessya Sevia Agustin

NIM : 20200070028

Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 27 Agustus 2000

Pendidikan : 2006-2012 SD Negeri 02 Kalapanunggal  
2012-2015 SMP Negeri 1 Kalapanunggal  
2015-2018 SMA Negeri 1 Parungkuda  
2020-2024 Universitas Nusa Putra

Publikasi Karya Ilmiah : - Implementasi Sistem Pengendalian Internal  
Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada KSP  
Makmur Mandiri  
- Analisis Kecurangan Laporan Keuangan  
Dalam Perspektif *Fraud* Pentagon

